

## Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Ibnu Taimiyah di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi

Adzan Fikri Kabeakan<sup>1</sup>, Sahliah<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
adzanfikri0204201009@uinsu.ac.id, sahliahsb13@gmail.com

### ABSTRACT

*The circulation of illegal cigarettes in Berampu has become a significant issue, negatively impacting state revenues and public health. Illegal cigarettes that do not meet excise standards cause substantial economic losses and place consumers at risk due to unregulated product quality. This article analyzes consumer protection against the circulation of illegal cigarettes from the perspective of positive law and the teachings of Ibn Taymiyyah. Through a normative approach, this study highlights the importance of enforcing excise regulations as a consumer protection instrument and the relevance of principles of justice in trade transactions according to Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah emphasizes the importance of transparency, honesty, and justice in trade, aligning with modern regulatory objectives to protect consumers from fraud and harmful products. The study concludes that consumer protection from illegal cigarettes must involve synergy between strict law enforcement, public education, and the application of strong moral values as outlined in Islamic teachings. This synergy is expected to provide a comprehensive solution in efforts to curb the circulation of illegal cigarettes in Indonesia.*

**Keywords:** *illegal cigarettes, consumer protection, Ibn Taymiyyah, excise regulations.*

### ABSTRAK

Peredaran rokok ilegal di Berampu telah menjadi permasalahan yang signifikan, berdampak buruk pada penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Rokok ilegal yang tidak memenuhi standar cukai menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan menempatkan konsumen dalam risiko karena produk yang tidak terjamin kualitasnya. Artikel ini menganalisis perlindungan konsumen terhadap peredaran rokok ilegal dari perspektif hukum positif dan ajaran Ibnu Taimiyah. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan regulasi cukai sebagai instrumen perlindungan konsumen dan relevansi prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi jual beli menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam perdagangan, yang selaras dengan tujuan regulasi modern untuk melindungi konsumen dari kecurangan dan produk berbahaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal harus melibatkan sinergi antara penegakan hukum yang ketat, pendidikan masyarakat, serta penerapan nilai-nilai moral yang kuat seperti yang diuraikan dalam ajaran Islam. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal di Berampu.

**Kata Kunci:** Rokok ilegal, perlindungan konsumen, Ibnu Taimiyah, regulasi cukai.

## PENDAHULUAN

Aktivitas merokok di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan signifikan selama beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data statistik, prevalensi merokok di kalangan pria dewasa meningkat dari 53,4% pada tahun 1995 menjadi 68,1% pada tahun 2016. Di kalangan perempuan dewasa, prevalensi merokok juga mengalami kenaikan dari 1,7% pada tahun 1995 menjadi 6,7% pada tahun 2013, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2016. Data ini mengungkapkan bahwa merokok telah menjadi kebiasaan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, terutama di kalangan pria dewasa, sebagaimana ditunjukkan oleh survei nasional terbaru yang menunjukkan prevalensi merokok yang sangat tinggi.

Sebagai contoh studi kasus yang penulis temukan di Kecamatan Berampu, rokok telah menjadi lebih dari sekadar barang konsumsi, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat<sup>2</sup>. Bagi sebagian orang, rokok bahkan dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya, pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai produk yang mereka jual, termasuk kewajiban bagi produsen rokok untuk mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan rokok yang diproduksi. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dengan memberikan informasi yang cukup mengenai risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok. Mengingat tingginya prevalensi merokok di Berampu. Salah satu pemenuhan ini adalah bagian dari hak dan ham yaitu upaya perlindungan hukum bagi manusia (Sahlia, 2020).

Perlindungan konsumen merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam regulasi perdagangan modern, khususnya dalam menjamin hak-hak konsumen terkait kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Di sisi lain, pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang untuk menjalankan bisnisnya. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menjadi dasar hukum bagi interaksi antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi barang dan jasa (Haris Budiman, 2024). Rokok, sebagai salah satu produk tembakau, menempati posisi sentral dalam diskursus ini mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kesehatan masyarakat, baik bagi perokok aktif maupun pasif.

Produk tembakau, khususnya rokok, dikenakan cukai oleh negara mengingat karakteristiknya yang memerlukan pengawasan ketat. Namun demikian, di lapangan masih dijumpai fenomena peredaran rokok ilegal yang tidak memenuhi standar cukai yang telah ditetapkan serta manipulasi harga jual yang cenderung tidak sesuai prinsip muamalah, Kesepakatan dalam jual beli tentu harus sesuai dengan prinsip muamalah. Setiap tindakan muamalah harus berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan dalam hidup bermasyarakat<sup>5</sup>. Keberadaan rokok ilegal ini tidak hanya mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan yang dihadapi oleh konsumen lokus penelitian di Kecamatan Berampu,

Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, peredaran rokok ilegal telah menjadi isu serius yang membutuhkan penanganan, khususnya terhadap peredaran rokok ilegal.

Islam memandang diskursus mengenai hukum merokok masih menjadi polemik, mengingat tidak adanya dalil yang secara eksplisit menyinggung masalah ini dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum merokok menggambarkan interpretasi *nash* dan pemahaman tentang dampak rokok, dengan sebagian ulama mengharamkan, memakruhkan, atau bahkan membolehkan konsumsi rokok berdasarkan situasi dan kondisi tertentu. Ibnu Taimiyah, seorang pemikir besar dalam Islam, berpendapat pentingnya tanggung jawab moral dalam kegiatan bisnis serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan, termasuk konsumen (Nurul Huda Prasetya, 2009).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bermaksud untuk melaksanakan sebuah kajian dengan judul "**Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Ibnu Taimiyah. di Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi**" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan hukum yang menggabungkan norma hukum positif dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya pandangan Ibnu Taimiyah, dapat memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam penanganan peredaran rokok ilegal, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak signifikan oleh permasalahan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi akademis yang substansial dalam upaya perlindungan konsumen dari ancaman yang ditimbulkan oleh produk tembakau ilegal, yang tidak hanya merugikan dari aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kesehatan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis beberapa aspek penting terkait perlindungan konsumen terhadap peredaran rokok ilegal. Pertama, perlu diteliti bagaimana peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran rokok ilegal. Kedua, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana pandangan Ibnu Taimiyah mengenai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam perdagangan dapat diimplementasikan dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk tembakau ilegal. Ketiga, untuk menilai bagaimana peran Pemerintah dalam memerangi bahaya rokok ilegal yang sedang masif di masyarakat saat ini agar dapat memperkuat perlindungan konsumen dari risiko yang ditimbulkan oleh produk ilegal, khususnya dalam daerah-daerah yang sangat terdampak oleh masalah ini seperti Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode studi kasus untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap peredaran rokok ilegal di Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena yang diteliti dan menghubungkannya dengan perspektif Ibnu Taimiyah serta peraturan hukum yang berlaku. Data akan dikumpulkan melalui tiga teknik utama: studi

literatur, wawancara, dan observasi. Studi literatur akan mencakup analisis dokumen-dokumen hukum, literatur akademis, serta tulisan-tulisan tentang pandangan Ibnu Taimiyah mengenai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam perdagangan (Dyah Ochtorina Susanti, 2018). Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pelaku usaha rokok, konsumen, dan ahli hukum Islam, untuk memperoleh pandangan dan pengalaman mereka terkait perlindungan konsumen dari rokok ilegal.

Observasi langsung akan dilakukan di lapangan untuk memahami dinamika peredaran rokok ilegal dan interaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan temuan penting serta melalui analisis komparatif untuk mengkaji integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip Islam dalam perlindungan konsumen. Triangulasi data akan diterapkan untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data<sup>8</sup>. Penelitian ini juga akan mematuhi prinsip-prinsip etika dengan menjaga kerahasiaan dan anonimitas informan serta memperoleh izin dari pihak-pihak terkait. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran rokok ilegal dan bagaimana integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip Islam dapat meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peredaran Rokok Ilegal yang bertentangan dengan Aktivitas Bisnis di Kabupaten Dairi**

Rokok merupakan salah satu komoditas konsumsi yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, banyak konsumen yang tidak sepenuhnya menyadari aspek legalitas dari produk tembakau yang mereka konsumsi. Hal ini mengakibatkan adanya peredaran rokok ilegal yang tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan tantangan besar dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap produk rokok yang diperdagangkan di Indonesia harus dilengkapi dengan pita cukai yang sah sebagai bukti pelunasan cukai. Aturan ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok, mengawasi peredarannya, serta meminimalkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat (May Dlin, 2022).

Sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, rokok dikategorikan sebagai barang kena cukai karena sifat dan karakteristiknya, yaitu konsumsinya yang perlu dikendalikan, peredarannya yang perlu diawasi, serta potensi dampaknya yang berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah juga memberlakukan tarif cukai yang tinggi pada produk tembakau, mengingat efek negatifnya, seperti penyakit paru-paru, gangguan reproduksi, penyakit lambung, dan risiko stroke. Namun demikian, rokok ilegal yang tidak memenuhi persyaratan cukai terus beredar di masyarakat, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam perlindungan konsumen dan pengawasan peredaran barang kena cukai.

Di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Berampu, penegakan

hukum terhadap peredaran rokok ilegal terus menjadi isu yang signifikan. Salah satu contoh nyata adalah operasi penindakan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Dairi bekerja sama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Pematang Siantar pada 28 Juni 2024. Operasi tersebut berhasil menyita 548 bungkus rokok dari berbagai merek, seperti Luffman, H1 Mild Gold, dan Manchester, yang dijual tanpa pita cukai resmi. Rokok-rokok ilegal ini diperoleh dan dijual oleh pelaku berinisial TASS, baik secara grosir maupun eceran dengan keuntungan mencapai satu juta rupiah per bulan (Andreas Purba, 2024).

Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Dairi berdasarkan data di atas menggambarkan masalah yang lebih luas di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Berampu. Rokok ilegal di Kecamatan Berampu masih menjadi perhatian utama, terutama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pengguna produk tersebut<sup>11</sup>. Salah satu tantangan dalam penegakan hukum terhadap rokok ilegal adalah rendahnya pemahaman konsumen dan pelaku usaha terkait aturan hukum yang berlaku dalam jual beli rokok. Sebagian besar pelaku usaha tidak menyadari larangan terhadap penjualan rokok ilegal, yang terbukti dari praktik penjualan rokok ilegal secara terang-terangan. Ketidaktahuan ini sering kali diperparah oleh tingginya harga rokok legal dan besarnya keuntungan yang dapat diperoleh dari menjual rokok ilegal.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) dan UMKM Kabupaten Dairi, telah berupaya menekan peredaran rokok ilegal dengan melakukan sinergi bersama KPP Bea Cukai Pematang Siantar<sup>12</sup>. Mereka mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang, warung, kios rokok legal dan ilegal. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memproduksi dan mengolah tembakau sesuai aturan yang ditetapkan, agar hasil olahan tembakau dapat memberikan kontribusi maksimal bagi penerimaan negara.

Bea Cukai juga berperan penting dalam upaya penegakan hukum. Selain sosialisasi internal, Bea Cukai memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui program-program sosialisasi tentang ketentuan teknis dan norma dalam perdagangan barang kena cukai. Selain sosialisasi, kegiatan evaluasi dan pemantauan lapangan juga dilakukan untuk mengawasi peredaran rokok ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal terus terjadi karena sebagian besar masyarakat belum memahami aturan yang ada, serta adanya persaingan usaha yang tidak sehat antara pengusaha rokok legal dan ilegal.

Keberadaan rokok ilegal menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kebocoran penerimaan negara di sektor cukai, persaingan usaha yang tidak sehat, serta peningkatan jumlah perokok di kalangan usia muda. Rokok ilegal sendiri terbagi dalam beberapa kategori, termasuk rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, serta rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya (Hasrawati Azis, 2024). Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kecamatan Berampu dan wilayah lainnya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi

hukum dari konsumsi rokok ilegal harus menjadi prioritas, di samping langkah-langkah preventif yang melibatkan razia dan penindakan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dapat diwujudkan dan peredaran rokok ilegal dapat dikendalikan.

### **Perspektif Ibnu Taimiyah dalam Perlindungan Konsumen**

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2] Ayat 188 sebagai berikut:

وَلْيَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas bisnis adalah transaksi yang harus dijalankan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Salah satu larangan utama yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya *al-Hisbah fi al-Islam (Lembaga Hisbah dalam Islam)* adalah larangan terhadap penipuan dalam transaksi jual beli. Menurutnya, setiap tindakan yang menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak akurat mengenai produk merupakan pelanggaran terhadap etika perdagangan. Penjual yang menampilkan hanya sisi baik dari barang dagangannya sementara menyembunyikan kekurangan atau cacat produk, dianggap melanggar prinsip transparansi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa setiap produk yang diperjualbelikan harus mencerminkan kualitas sebenarnya, sehingga konsumen tidak dirugikan oleh ketidakjujuran penjual. Dalam hal ini, kewajiban penjual adalah memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang barang dagangan, tanpa menyembunyikan kekurangan yang mungkin ada. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa menutupi cacat barang dalam jual beli merupakan bentuk penipuan yang merusak keadilan dalam transaksi ekonomi.

Selain itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa meskipun penjual berhak memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli, keuntungan tersebut harus dicapai secara wajar dan adil. Keuntungan yang diperoleh tidak boleh merusak hak-hak pembeli atau melanggar prinsip keadilan dalam perdagangan. Keuntungan yang adil, menurut Ibnu Taimiyah, adalah keuntungan yang diperoleh melalui praktik perdagangan yang sehat, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini jelas bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak penjual untuk mendapatkan keuntungan dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan produk yang sesuai dengan harapan.

Penjualan rokok ilegal yang penjualannya terus meningkat di Indonesia, perlindungan konsumen menjadi sangat esensial. Rokok ilegal sering kali tidak mematuhi prinsip transparansi dan kejelasan yang menjadi syarat dalam hukum Islam, terutama dalam hal regulasi cukai, kualitas produk, dan harga yang wajar.

Penjualan rokok ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen karena mereka tidak menerima informasi yang akurat terkait produk yang mereka konsumsi, sehingga perlindungan konsumen sangat diperlukan untuk mencegah kerugian yang timbul akibat transaksi yang tidak sah (Nila Rahmawati Lubis, 1999).

Legalitas informasi kesehatan, komposisi hingga kadaluwarsa rokok ilegal ini harus dapat dipastikan secara jelas karena meninjau dari angka konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut niscaya semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan dibuatnya peraturan mengenai rokok ilegal ini akan berdampak pula secara hukum kepada produsen-produsen rokok elektronik. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi perlindungan. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai atau digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan atau membahayakan konsumen itu sendiri.

Dalam hal ini, pandangan Ibnu Taimiyah mengenai perlindungan konsumen memberikan perspektif yang relevan. Menurut Ibnu Taimiyah, salah satu bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli adalah menyembunyikan cacat atau kekurangan barang dagangan, dengan cara menampilkan bagian yang baik dan menyembunyikan sisi yang rusak. Dalam rokok ilegal, penjualan yang tidak memenuhi standar kualitas atau tidak mematuhi regulasi yang berlaku merupakan bentuk penipuan yang mencederai hak konsumen. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa produk yang diperdagangkan harus 'sehat', dalam arti kondisinya harus sesuai dengan apa yang tampak di luar, sehingga informasi yang diberikan kepada konsumen harus benar dan akurat agar hak-hak konsumen dapat terlindungi.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip-prinsip etika dan keadilan merupakan komponen fundamental dalam setiap transaksi jual beli. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka, memberikan kritik tajam terhadap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*. *Gharar* dalam hal ini merujuk pada transaksi yang melibatkan ketidakjelasan, seperti penjualan barang yang belum ada, sulit diserahkan, atau memiliki sifat yang tidak jelas. Menurut Ibnu Taimiyah, transaksi yang mengandung *gharar* berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama konsumen, yang mungkin tidak memiliki pengetahuan lengkap tentang barang yang mereka beli. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai atau digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan atau membahayakan konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, transaksi semacam ini dianggap tidak sah dan dilarang, karena potensi kerugiannya (Zulham, 2013).

Ibnu Taimiyah menggaris bawahi bahwa meskipun pedagang berhak untuk memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang adil dan tidak merugikan konsumen. Jika keuntungan diperoleh melalui praktik-praktik curang, seperti menyembunyikan kekurangan produk atau memberikan

informasi yang menyesatkan, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Dalam pandangan ini, penjual diwajibkan untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan, serta memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi produk tersebut. Artinya, keberadaan rokok ilegal telah menyalahi peraturan dan jauh dari persyaratan jual beli yang halal dan baik menurut Islam

### **Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum dan Edukasi Konsumen terhadap Keberadaan Rokok Ilegal**

Peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Rokok ilegal, yang diproduksi dan diperdagangkan tanpa memenuhi ketentuan hukum, terutama tanpa disertai pita cukai resmi, memberikan dampak signifikan baik terhadap penerimaan negara maupun terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah upaya untuk menanggulangi permasalahan ini melalui pendekatan hukum yang tegas serta edukasi kepada masyarakat. Penegakan hukum menjadi salah satu fokus utama, di mana aparat Bea Cukai, bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah, terus melakukan operasi penindakan terhadap produsen, distributor, dan pengecer rokok ilegal. Operasi semacam ini bertujuan untuk menyita dan menghentikan peredaran rokok yang melanggar aturan cukai, termasuk rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai resmi atau menggunakan pita cukai palsu. Namun, upaya penegakan hukum ini kerap dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya aparat serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan konsumen dan pedagang mengenai dampak peredaran rokok ilegal.

Selain tindakan hukum, pemerintah juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bahaya dan dampak negatif dari rokok ilegal. Melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Bea Cukai dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya membeli dan mengonsumsi rokok yang sesuai dengan regulasi (Bagus Imam Syafi'i Assauqi, 2022). Edukasi ini juga mencakup informasi mengenai peran penting cukai dalam penerimaan negara, yang mana cukai dari produk tembakau legal dialokasikan untuk berbagai program publik, termasuk kesehatan dan pendidikan. Di sisi lain, pemerintah juga menggandeng sektor swasta, khususnya produsen rokok legal, dalam menjalankan kampanye edukatif yang disampaikan melalui berbagai saluran media. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya mematuhi regulasi cukai dan memilih produk yang aman serta berkualitas

Peran media massa dalam upaya edukasi juga menjadi sangat strategis. Melalui penyebaran informasi yang masif, baik di media cetak maupun digital, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bahaya konsumsi rokok ilegal yang sering kali diproduksi tanpa standar kesehatan yang jelas<sup>19</sup>. Dengan langkah-langkah komprehensif ini, diharapkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan konsumen dan bahaya peredaran rokok ilegal semakin meningkat.

Kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan edukasi berkelanjutan diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal, sehingga tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor cukai tembakau.

## KESIMPULAN

Peredaran rokok ilegal di Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak luas, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Rokok ilegal yang beredar tanpa memenuhi persyaratan cukai menyebabkan kerugian negara dalam hal penerimaan pajak serta menempatkan konsumen pada risiko bahaya kesehatan yang lebih besar akibat produk yang tidak terstandar. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dalam pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya regulasi cukai.

Dari perspektif hukum Islam, pandangan Ibnu Taimiyah mengenai keadilan dalam transaksi bisnis memberikan landasan moral yang kuat untuk perlindungan konsumen. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, serta tanggung jawab sosial dalam perdagangan, di mana setiap bentuk kecurangan dalam jual beli, termasuk penjualan produk yang cacat atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Pandangan ini relevan dalam konteks peredaran rokok ilegal, di mana ketidakpatuhan terhadap regulasi hukum dianggap sebagai bentuk kecurangan yang merugikan konsumen.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah preventif dan represif melalui penegakan hukum serta edukasi publik. Operasi penindakan terhadap produsen dan pedagang rokok ilegal dilakukan secara berkala, sementara program sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya rokok ilegal dan pentingnya cukai juga terus digalakkan. Namun untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta penguatan kesadaran hukum di kalangan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Y. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKANBARU* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Lancang Kuning.
- Azis, H., & Burhan, I. (2024). PERSEPSI PEREDARAN ROKOK ILEGAL TERHADAP PENERIMAAN CUKAI ROKOK DAN PAJAK ROKOK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1).
- Azqia, H. (n.d.). *JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM*.
- Budiman, H. (2024). Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Kuningan. *Logika*, 15(01), 75–84.

- Dlin, M., & Anto, A. D. (2022). ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI BALIKPAPAN. *Jurnal Hukum*, 4.
- edc, H. (2024, Mei Jumat). *Dinas Perdagangan NTB Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Rokok Ilegal*. Lombok Post. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1504709773/dinas-perdagangan-ntb-sosialisasi-dan-edukasi-bahaya-rokok-ilegal>
- Hanafi, I., & Sulistyantoro, H. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Rokok Ilegal (Studi Kasus di KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan). *Mandub*, 2(1), 85–101.
- Lubis, N. R. (n.d.). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Sepeda Motor Baru Mengenai Kerusakan Rangka Esaf Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *UNESREV*, 6(2).
- Nazir, M. (n.d.). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ochtorina Susanti, D., & Efendi, A. (2018). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Prasetya, N. H. (n.d.). ANALISIS FATWA MUI MENGENAI HARAM ROKOK DALAM PISAU SHÁDZAD-DZÁRIYÁT FIKIH MELALUITAFSIR.
- Purba, A. (2024, Juni 29). *Sat Reskrim Polres Dairi Amankan 548 Bungkus Rokok Ilegal*. RRI. <https://rri.co.id/index.php/daerah/789673/sat-reskrim-polres-dairi-amankan-548-bungkus-rokok-ilegal>
- Rahmawati Lubis, N. (2021). *Skincare Share in Jar di Aplikasi Shopee* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sahlia. (2020). ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA. *TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2).
- Syafi'i, B. I., & Islam, M. A. (2022). SOSIALISASI CUKAI DAN ROKOK ILEGAL MELALUI PERANCANGAN ANIMASI EXPLAINER DI KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Desain*, 3.
- Taimiyah, I. (n.d.). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Maktabah Alamiyah.
- Wahyu Andira, R., & Permata, C. (2022). Penentuan Harga Pada Sistem All You Can Eat di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue)*, 274.
- Wardani, N. K., Denhaq, B., & Sood, M. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Lombok Barat.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Grup.